

STRATEGI MENGOPTIMALKAN PERANAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DALAM MENGHADAPI TANTANGAN FAKTOR RENDAHNYA KONTRIBUSI PADES DI LEMBAGA PTX

Ayu Dwi Lestari^{1*}, Binti Shofiatul Jannah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : ayyudewilla@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze optimal strategies in increasing the role of Village Original Income (PaDes) in Lamongan Regency in order to face the challenge of low PaDes contribution to village development. Using descriptive qualitative methods, data was collected through in-depth interviews and document analysis to identify causal factors and relevant solutions. The research results show that the low contribution of PaDes is caused by limited human resource capacity, lack of exploration of local potential, and minimal application of technology. The proposed strategy includes training village officials, diversifying PaDes sources, and utilizing digital technology for transparency and accountability.

Keywords: Pelaporan Keuangan, BPS Lamongan, Pendapatan Asli Daerah

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pemerintah desa mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan masyarakat di tingkat desa dalam sistem Negara. desa itu seperti sebuah pemerintahan kecil yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tugas-tugas desa ini sangat beragam, mulai dari mengatur pemerintahan desa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, hingga menjaga ketertiban lingkungan. Karena tugasnya yang banyak, struktur organisasi desa harus mencerminkan semua tugas tersebut. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara jelas mengatur tentang kewenangan dan struktur organisasi desa (Zainudin, 2016).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengklasifikasikan tugas dan wewenang pemerintahan desa menjadi empat bidang utama. Perubahan ini berdampak pada struktur organisasi desa, di mana jabatan kepala urusan ditingkatkan menjadi kepala bidang (Zainudin, 2016).

Sesuai dengan pandangan R. Bintarto, desa merupakan manifestasi dari harmoni antara aktivitas manusia dan lingkungan fisiknya. Kondisi geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya suatu wilayah saling mempengaruhi dan membentuk karakteristik desa yang unik, baik dalam konteks internal maupun eksternal (Istilah, 2023). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa memiliki visi untuk menjadikan desa sebagai unit sosial yang mandiri dan berdaya. Desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik. (Ashar Prawitno, 2019).

Pendapatan Asli Desa merupakan sumber penerimaan keuangan desa yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PADes mencakup hasil usaha, pengelolaan aset desa, serta kontribusi masyarakat. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1a) (Astuti, 2015).

Pendapatan Asli Desa (PaDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa. PaDes memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas fiskal desa, yang PaDes gilirannya mendukung penyelenggaraan pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Namun, meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi, realisasi dan kontribusi PaDes di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan, masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti minimnya potensi sumber daya lokal, kurang optimalnya pengelolaan aset desa, serta rendahnya inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru.

Rendahnya kontribusi PaDes ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa, terutama dalam mencapai kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan PaDes penyaluran dana pemerintah pusat atau daerah yang dikirim cetan dengan transfer. BPS Lamongan, sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam pengumpulan data dan statistik daerah, juga mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi dan pengelolaan PaDes antara desa satu dengan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan peranan PaDes, yang tidak hanya sekadar meningkatkan pendapatan tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

REVIU LITERATUR

Good Governance Theory

Menurut Rahimallah (2022) Pengertian good governance mencakup mekanisme pemerintahan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan social-ekonomi suatu negara menuju tata pemerintahan yang berkualitas. Bagi Indonesia, konsep ini menjadi tujuan krusial dalam transformasi system birokrasi (Agung Kurniawan, 2021). Implementasi good governance dimaksudkan untuk mendorong percepatan transformasi system birokrasi kualitas layanan publik dan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem birokrasi yang selama ini rentan terhadap penyimpangan dan ketidakefisienan (Idris, 2017).

Institutional Theory

Teori Kelembagaan (Institutional Theory) Scot) Menurut teori kelembagaan, struktur sosial yang sudah mapan, seperti aturan, nilai, dan keyakinan, sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan aktivitas masyarakat. Elemen-elemen ini memberikan landasan yang kokoh bagi kehidupan social oleh Hessels dan Terjesen pada 2008 (Wati, 2018). Dalam elemen kultural-kognitif, Jika sebelumnya peran masyarakat hanya sebatas menghadiri pertemuan formal, kini masyarakat diharapkan berperan aktif dalam membentuk kebijakan melalui tekanan

dan tuntutan. Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalitas para pelakunya (Shabrina Agustin Ghassani, 2023).

Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan adalah komunikasi formal yang ditujukan kepada pengguna laporan untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain yang memiliki dampak keuangan pada suatu entitas (Indra Fauzi, 2024). Kepala desa wajib melaporkan beberapa hal kepada bupati atau wali kota, yaitu laporan penggunaan anggaran desa setiap tahun, laporan tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa setiap akhir tahun, laporan akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota., laporan tahunan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) (Yuliana Ayu Sagitarini, 2022).

Laporan keuangan desa wajib memenuhi seluruh kriteria kualitas laporan keuangan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pendapat Muindro, kualitas laporan keuangan merupakan ukuran sejauh mana informasi akuntansi yang disajikan dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan (Finta Munti, 2017). Dikatakan laporan baik meliputi:

1. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan harus berguna. Informasi harus dapat membantu kita menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan memprediksi masa depannya.

2. Andal

Laporan keuangan cerminan kondisi keuangan. Penyajian juga sesuai dengan lapangan agar laporan dapat dikatakan baik dan realistis.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang bersifat komparatif, baik dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas lain, akan memberikan informasi yang lebih bernilai. Prinsip konsistensi dalam penggunaan metode akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa perbandingan tersebut akurat dan relevan. Dengan demikian, kita dapat menilai kinerja perusahaan secara lebih objektif.

4. Dapat dipahami

Pengguna laporan keuangan diharapkan memiliki pemahaman yang memadai tentang bisnis dan akuntansi agar dapat menginterpretasi informasi yang disajikan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tujuan tersebut menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebagaimana kepala desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan desa, penyusun laporan keuangan juga bertanggung jawab atas akurasi dan relevansi informasi yang disampaikan (Putri, 2020).

Pokok Permasalahan

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana strategi yang efektif dapat diimplementasikan oleh pemerintah desa di Kabupaten Lamongan untuk mengoptimalkan peranan PaDes dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kontribusi PaDes. Kajian ini juga mempertimbangkan peran BPS Lamongan dalam menyediakan data yang mendukung analisis dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Permasalahan ini diurai dengan pendekatan kualitatif, yang menggali lebih dalam persepsi, tantangan, dan peluang yang ada di lapangan.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun penelitian memiliki tujuan menggali strategi efektifnya strategi dalam mengoptimalkan peranan PaDes di Kabupaten Lamongan, dengan mempertimbangkan tantangan rendahnya kontribusi PaDes dan peran BPS Lamongan dalam menyediakan data yang relevan. Perolehan penelitian bermanfaat memberikan panduan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan PaDes, yang PaDes gilirannya diharapkan dapat mendukung pembangunan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Hal lain menjadi referensi referensi bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan kebijakan pengelolaan PaDes yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada penggambaran mendalam tentang strategi optimalisasi peranan Pendapatan Asli Desa (PaDes) dalam menghadapi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi PaDes di BPS Lamongan melalui pendekatan studi kasus atau deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena secara mendalam, dengan fokus PaDes pengalaman dan pandangan pihak-pihak terkait. Seluruh desa menjadi populasi. Sampel dipilih secara berdasarkan kriteria tertentu, yaitu desa-desa yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan PaDes. Peneliti akan memilih 5-10 desa sebagai sampel penelitian, yang dianggap representatif dalam menghadapi tantangan yang diidentifikasi. Melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) di Lamongan akan diperoleh hasil adanya.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Perolehan Asli Desa (PaDes): Perolehan desa dari sumber-sumber yang sah, termasuk hasil usaha milik desa, hasil aset desa, dan hasil kerja sama desa.
2. Kontribusi PaDes: Besaran atau proporsi PaDes terhadap pendapatan total desa, yang diukur berdasarkan data BPS.
3. Strategi Optimalisasi: Langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh desa untuk meningkatkan kontribusi PaDes, seperti pengembangan usaha milik desa dan peningkatan transparansi keuangan.
4. Tantangan Rendahnya Kontribusi PaDes: Faktor-faktor yang menyebabkan PaDes tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan desa, termasuk masalah manajemen, kebijakan pemerintah, dan kurangnya inovasi usaha desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PaDes) terhadap total penerimaan pemerintah desa menjadi kecil yakni adanya sumber pendapatan potensial di luar wewenang pemerintah desa menjadi kendala utama dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PaDes) terhadap total penerimaan pemerintah desa. Keberadaan aset dan sumber daya alam yang belum dioptimalkan menjadi peluang bisnis yang

belum terealisasi. Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi sorotan, karena masih belum mencapai efisiensi yang diharapkan. Meskipun seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan signifikan, BUMDes masih terkendala dalam manajemen dan pemasaran produk-produknya.

Kurangnya aktivitas perekonomian desa menjadi tantangan lainnya. Keterbatasan akses pasar, infrastruktur yang belum memadai, dan tingkat konsumsi yang rendah menghambat potensi pendapatan. Di samping itu, kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam menggali sumber pendapatan alternatif turut memperparah situasi ini. Identifikasi dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan alternatif masih belum optimal, sehingga ketergantungan PaDes dana dari pusat secara transfer.

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PaDes) terhadap total penerimaan pemerintah desa, langkah-langkah strategis berikut dapat diambil. Pertama, pemerintah desa perlu fokus PaDes pengelolaan potensi aset dan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka dengan optimal. Ini meliputi identifikasi potensi tersebut dan pengembangan usaha berbasis lokal seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri kecil. Selanjutnya, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi krusial. Dukungan serta pelatihan dalam manajemen dan pemasaran produk BUMDes dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk lokal.

Kemudian, stimulasi aktivitas ekonomi melalui peningkatan akses pasar dan infrastruktur menjadi kunci. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih akan membuka aksesibilitas dan memperluas pasar bagi produk lokal. Selain itu, pengembangan sumber pendapatan alternatif di luar PaDes perlu diperhatikan dengan serius. Pemerintah desa harus aktif dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber pendapatan alternatif, termasuk pengembangan sektor ekonomi kreatif, kerajinan, industri kecil, dan layanan jasa.

Terakhir, mendorong investasi swasta di tingkat desa menjadi strategi penting. Memberikan insentif dan fasilitas bagi investasi swasta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan kontribusi PaDes dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan di tingkat desa.

Menghadapi tantangan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kabupaten Lamongan, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan peran PADes dalam pembangunan desa. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Desa

Melakukan inventarisasi potensi yang ada pada des, baik SDA maupun SDM. Hal ini bertujuan untuk memahami kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PADes.

2. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Mendorong pembentukan dan pengembangan BUMDes sebagai entitas yang dapat mengelola usaha lokal. BUMDes harus dikelola dengan baik agar dapat berkontribusi signifikan terhadap PADes melalui berbagai usaha, seperti perdagangan, jasa, dan produksi lokal.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas anggota BUMDes dan masyarakat dalam mengelola usaha secara efisien dan efektif.

4. Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa

Memastikan bahwa aset desa dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan aset desa juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa aset tersebut memberikan kontribusi maksimal terhadap PADes. (Muhammad Rafi Akbar Nasuha, 2024)

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PaDes) di Kabupaten Lamongan merupakan masalah mendesak yang diakibatkan oleh berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup keterbatasan masyarakat yang kompeten n mengenai mengelola keuangan desa, minimnya pemahaman terkait potensi lokal yang dapat dioptimalkan, serta kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan sumber PaDes. Sementara itu, tantangan eksternal melibatkan rendahnya dukungan infrastruktur, akses terhadap teknologi, dan kurangnya regulasi yang adaptif terhadap kebutuhan desa.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mengatasi kendala teknis, tetapi juga memberdayakan semua aspek yang mendukung pengelolaan PaDes secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut mencakup tiga pilar utama: pengembangan kapasitas aparat desa melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, penerapan inovasi digital yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, serta optimalisasi potensi lokal yang melibatkan identifikasi dan pengembangan sumber daya ekonomi berbasis kearifan lokal.

Dengan strategi ini, diharapkan PaDes dapat menjadi sumber pendapatan utama yang mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Desa yang mampu meningkatkan PaDes secara signifikan tidak hanya akan memiliki otonomi finansial yang lebih baik, tetapi juga akan menjadi model pengelolaan desa mandiri yang dapat menginspirasi daerah lain untuk menerapkan pendekatan serupa.

Keterbatasan

1. Keterbatasan Data Sekunder yang Terperinci

Beberapa data sekunder, seperti laporan keuangan desa atau potensi PaDes spesifik di Kabupaten Lamongan, tidak seluruhnya tersedia secara lengkap atau mutakhir, sehingga analisis terbatas PaDes data yang berhasil dihimpun.

2. Keterbatasan Responden

Penelitian ini hanya melibatkan responden tertentu, seperti aparat desa dan pemerintah daerah, sehingga pandangan masyarakat umum terkait pengelolaan PaDes belum sepenuhnya tergambarkan.

3. Cakupan Wilayah yang Terbatas

Studi difokuskan PaDes Kabupaten Lamongan, sehingga hasil dan rekomendasi yang dihasilkan mungkin belum sepenuhnya relevan jika diterapkan di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.

4. Keterbatasan Pendekatan Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memberikan pemahaman mendalam, tetapi tidak dapat menggambarkan hubungan kausal atau mengukur dampak strategi tertentu secara kuantitatif.

5. Minimnya Pendekatan Longitudinal

Penelitian ini hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga belum dapat mengevaluasi dampak jangka panjang dari strategi yang diusulkan untuk mengoptimalkan PaDes.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penggunaan Pendekatan Kuantitatif

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan atau pengaruh faktor-faktor spesifik terhadap peningkatan PaDes, seperti kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan inovasi pengelolaan.

2. Cakupan Responden yang Lebih Luas

Peneliti di masa depan disarankan untuk melibatkan berbagai kelompok responden, termasuk masyarakat desa, pelaku usaha lokal, dan lembaga non-pemerintah, guna mendapatkan perspektif yang lebih beragam mengenai pengelolaan PaDes.

3. Analisis Perbandingan Antar Wilayah

Studi mendatang dapat melakukan analisis perbandingan antar wilayah di luar Kabupaten Lamongan untuk memahami keberhasilan atau kegagalan strategi peningkatan PaDes di daerah dengan karakteristik yang berbeda.

4. Pendekatan Longitudinal

Penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan secara longitudinal untuk memantau dampak jangka panjang dari strategi yang diimplementasikan dalam pengelolaan PaDes.

5. Eksplorasi Teknologi Digital

Studi lanjutan dapat menitikberatkan PaDes eksplorasi dan evaluasi penerapan teknologi digital, seperti aplikasi keuangan desa atau sistem manajemen berbasis teknologi, untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan PaDes.

6. Fokus PaDes Inovasi Berbasis Kearifan Lokal

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang inovasi berbasis kearifan lokal yang berpotensi mendukung optimalisasi PaDes, termasuk strategi diversifikasi usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

7. Integrasi dengan Kebijakan Nasional

Disarankan untuk mengkaji keterkaitan antara kebijakan nasional dan pengelolaan PaDes di tingkat lokal, guna memahami sejauh mana regulasi dapat memengaruhi atau mendukung peningkatan PaDes di desa.

Dengan mengatasi keterbatasan yang ada dan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penelitian berikutnya dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan strategi yang lebih efektif dalam mendukung optimalisasi PaDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan, S. (2021). MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN TATA. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 134-148.
- Ashar Prawitno, R. s. (2019). ANALISIS PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 51.
- Astuti, I. (2015). *PENGLOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA*. Surakarta.
- Fajriyah, R. B. (2022-2023). Statistik Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Lamongan 2022-2023. *Statistik Keuangan*, 1-38.
- Finta Munti, h. F. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 172-182.
- Idris, A. (2017). Bingkai Birokrasi Indonesia. *Jurnal Paradigma (JP)*, 352.
- Indra Fauzi, B. A. (2024). PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN ACCURATE DALAM PENYUSUNAN. *Jurnal Bisnis Net*, 220-229.
- Istilah, P. d. (2023, November 27). *Pengertian Desa Menurut Ahli, Ciri-Ciri, dan Fungsinya*. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-desa-menurut-ahli-ciri-ciri-dan-fungsinya-21esQIvpBsa/full>
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Desa*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM.
- Muhammad Rafi Akbar Nasuha, A. K. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 153-167.
- Oktyandito, Y. W. (2024, Oktober 4). *Pengertian BPS*. Retrieved from idntimes.com: <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/bps-pengertian-peran-tugas-fungsi-dan-wewenang>
- Putri, B. &. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 1658-1669.
- Shabrina Agustin Ghassani, D. S. (2023). Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor:. *Majalah Geografi Indonesia*, 48-55.
- Wati, E. (2018). *ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG-UNDANG*. Indralaya.
- Yuliana Ayu Sagitarini, A. M. (2022). Efektivitas pengolaan dana Desa ditinjau dari Kualitas pelaporan keuangan Desa di Desa Sumbersekar. *Jurnla Magister Auntansi Trisakti*, 73-88.
- Zainudin, A. (2016). Model kelembagaan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*.